KESEHATAN MENTAL, PENGAWASAN MELEKAT DAN PERILAKU KORUPSI

Nurkholis

Program Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293

Abstract: Mental Health and Behavior Monitoring Fitted Corruption. This study aims to identify and analyze the extent of the influence of mental health and oversight attached to corruption. This research is a descriptive research with quantitative approach. The population in this study were employees of the Faculty of Agriculture, University of Riau administration and teachers or lecturers. Data collection techniques were questionnaires, observations and interviews. Analysis of data through multiple regression statistical test program with the help of Statistical Product and Service Solution (SPSS) 16.5 for windows. The results showed that there are significant negative and significant correlation between mental health and oversight attached to the corruption of 66.7%. That is, the healthier the better mental and oversight attached to the action for corruption is getting low. Conversely, if the unhealthy mental and worse levels of supervision attached to the action for corruption is increasing.

Keywords: mental health, embedded control, behavioral corruption

Abstrak: Kesehatan Mental, Pengawasan Melekat dan Perilaku Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa sejauh mana pengaruh kesehatan mental dan pengawasan melekat terhadap perilaku korupsi. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Fakultas Pertanian Universitas Riau baik administrasi maupun pendidik atau dosen,. Teknik pengumpulan data adalah kuisioner, observasi dan wawancara. Analisis data melalui uji statistic regresi berganda dengan bantuan program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) 16,5 *for windows*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negative dan signifikan antara kesehatan mental dan pengawasan melekat terhadap perilaku korupsi sebesar 66.7%. Artinya, semakin sehat mental dan semakin baik pengawasan melekat maka tindakan untuk melakukan korupsi semakin rendah. Sebaliknya, jika semakin tidak sehat mental dan semakin buruk tingkat pengawasan melekat maka tindakan untuk melakukan korupsi semakin tinggi.

Kata kunci: kesehatan mental, pengawasan melekat, perilaku korupsi

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat sekarang ini ternyata banyak persoalan yang harus dihadapi oleh setiap orang dalam rangka memperoleh kesejahteraan dan penghidupan yang layak. Dimana proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah pen-

ingkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Menurut Hartanti (2006), salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan fenomenal adalah masalah korupsi.

Salah satu perilaku pada level individu maupun sosial yang mewarnai kehidupan masyarakat modern sejak beberapa dekade terakhir ini adalah adanya kecenderungan untuk menginginkan segala sesuatu dengan cara yang praktis dan tercapai dalam waktu yang singkat. Perilaku yang demiki-

an seringkali disebut dengan perilaku “serba instan” yang kerap kali bertujuan demi pemuasan kehendak, nafsu, dan gaya hidup hedonistik. Perilaku *serba instan* ini mendorong orang untuk berperilaku dengan cara yang menghalalkan segalanya, *serba cepat* dan tidak peduli terhadap kemaslahatan bersama atau kepentingan sosial, yang ada dalam pikiran mereka adalah bagaimana kemauan tercapai, kehidupan *serba hedonistik*, dan kepuasan terwujud tanpa peduli apakah tindakan tersebut akan merugikan masyarakat atau negara pada konteks yang lebih luas.

Pemberitaan tentang berbagai kasus korupsi hampir setiap hari menghiasi pemberitaan di media cetak maupun elektronik. Perilaku korupsi telah menjangkiti berbagai elemen masyarakat dan lembaga Negara, baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Korupsi tidak hanya di ibukota sebagai Negara sebagai pusat pemerintah namun juga telah menjalar kedaerah-daerah bahkan daerah terpencil sekalipun, dari level yang paling tinggi seperti lembaga-lembaga Negara hingga level yang paling rendah seperti desa atau kampung. Dari masyarakat yang berpenampilan *perlente* hingga yang berpakaian sederhana, mereka turut menjadi pelaku korupsi baik secara sengaja maupun tidak, baik disadari maupun tidak. Begitu juga yang terjadi pada saat peneliti melakukan pengamatan di lingkungan Fakultas Pertanian berbagai peraturan telah dibuat dalam rangka menegakkan system pengawasan. Namun, berdasarkan hasil pengamatan September 2014-Mei 2015 pada pegawai Fakultas Pertanian dan informasi dari berbagai sumber yang relevan, penulis melihat adanya kelemahan dalam hal pengawasan yang dilakukan terhadap pegawai Faperta yang bisa memunculkan potensi terjadinya perilaku korupsi. Yaitu (1) Ada beberapa oknum pegawai yang datang terlambat dan pulang lebih cepat meskipun belum waktunya pulang kantor (perilaku korupsi waktu), tetapi hal ini dibiarkan oleh atasan pegawai yang bersangkutan. (2) Selain itu juga ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa

memberikan keterangan atau absen lalu menghilang meninggalkan pekerjaan tanpa pemberitahuan. (3) Laporan terhadap terjadinya pelanggaran dan penyelewengan tidak dihiraukan oleh atasan, seolah-olah dianggap sudah merupakan hal yang biasa. (4) Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku pelanggaran dan penyelewengan pegawai terutama terkait perilaku korupsi. (5) Pemiaraan proses pengangkatan pegawai kontrak yang cenderung system nepotisme, bahkan ada 2 orang/ lebih satu keluarga yang bekerja dalam tempat yang sama. (6) Gaji pegawai kontrak diambil dan ditandatangani tanpa diserahkan pada yang bersangkutan, namun tidak ada atau belum terkontrol. Bahkan pernah terjadi pemotongan gaji yang tanpa keterangan yang jelas. (7) Penentuan gaji yang tidak berkeadilan dan berkesejahteraan (kerja >5 tahun dan <1 tahun, pendidikan S2 dan SMA dianggap sama rata). Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tingkat kesehatan mental, pengawasan melekat dan perilaku korupsi.

Menurut Kartono (2000), bahwa masyarakat modern yang asyik memburu keuntungan dan kemewahan material sekarang ini banyak mengandung unsur eksplosif yaitu mudah pecah dalam bentuk tindakan kekerasan, kriminal, pola asusila, amuk-amukan, tindak nekat menyerempet bahaya, pola buteng-tuli, aur-auran, perilaku korupsi, pengacauan, pemberontakan, dan lain-lain perilaku kekerasan dan kesadisan. Sebagai akibatnya banyak penduduk menjadi tegang syaraf, mengalami stres berat, menjadi panik, yang suatu waktu bisa menjadi gejala penyakit jiwa atau gangguan mental.

Di tengah hiruk pikuk kehidupan kota yang tergesa-gesa dan banyak menuntut, orang terpaksa untuk terus berpacu dan bersaing dalam perlombaan hidup dan mengejar kemajuan zaman. Suasana kompetitif ini meliputi tingkah laku yang tidak wajar atau abnormal atau menyimpang yaitu: pola tingkah laku kriminal, manipulatif, abskur gelap-gelapan, licik, munafik, eksploitatif,

lacur, dan pola yang berbahaya lainnya. Semua kejadian ini menyebabkan ketakutan dan kecemasan, juga stres pada penduduknya, dan menjadi penyebab utama bagi membiarkannya penyakit-penyakit mental di tengah masyarakat luas.

Sementara itu diketahui bahwa di dalam diri manusia terdapat berbagai aspek psikis diantaranya minat, sikap, persepsi, kesehatan fisik dan mental. Menurut Coleman dalam CSRC, korupsi merupakan salah satu perilaku instan yang dipandang sebagai gejala patologi sosial dan penyakit mental. Dengan demikian kondisi mental yang sehat maupun mental yang tidak sehat akan berpengaruh terhadap munculnya perilaku perilaku korupsi yang dilakukan oleh individu dalam kehidupannya.

Menurut Jahoda (dalam Hariana, 2005), bahwa kesehatan mental merupakan kondisi seseorang yang menyangkut penyesuaian diri yang aktif dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan, dengan kondisi-kondisi baru, serta mempunyai penilaian nyata tentang kehidupan maupun keadaan diri sendiri. Sementara Darajat (1995), menyebutkan bahwa kesehatan mental sebagai kemampuan untuk menyesuaikan diri sendiri, orang lain, dan masyarakat serta lingkungan dimana ia hidup.

Pemikiran tentang kesehatan mental yang menekankan kemampuan penyesuaian diri seseorang, menyamakan seseorang yang sehat psikis, baik itu penyesuaian diri terhadap tuntutan masyarakat pada umumnya atau terhadap tuntutan orang lain khususnya. Dengan demikian orang yang sehat mentalnya secara mudah bisa melakukan adaptasi (penyesuaian diri) selalu aktif berpartisipasi, bisa menerapkan diri dengan lancar pada setiap perubahan sosial, selalu sibuk melaksanakan relisasi diri dan senantiasa menikmati kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan (Kartono, 2000).

Menurut Sobur (dalam Hariana, 2005), kemampuan menyesuaikan diri tidak lepas dari kepribadian yang sehat, matang, dan terlepas dari trauma-trauma ataupun konflik pada masa kanak-kanak. Menurut

Ibnu Maskawaih dalam CSRC (2006), perilaku korupsi yang merupakan patologi sosial akibat mental yang tidak sehat tercermin dari perilaku rakus, kedungguan, zalim, dan kehilangan kendali diri.

Selain itu, salah satu faktor yang menyebabkan perilaku korupsi adalah lemahnya sistem pengawasan didalam sebuah organisasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Harahap (2006) faktor eksternal penyebab perilaku korupsi yang menyangsarakan rakyat adalah akibat lemahnya pengawasan, karena pengawasan hanya berlangsung *pro forma*, memberi peluang yang besar bagi mereka yang akan melakukan tindak pidana perilaku korupsi. Setebal-tebal iman seseorang, sulit baginya untuk tidak melakukan perilaku korupsi dengan alasan bahwa tindakannya itu tidak akan diketahui dan walaupun diketahu tidak akan diusut karena semua orang melakukan hal yang sama.

Hal ini diperkuat pendapat Harahap (2006) yang menyatakan bahwa pengendalian manajemen merupakan syarat mutlak untuk meminimalisir tindakan perilaku korupsi. Semakin lemah/longgar pengendalian manajemen semakin terbuka peluang untuk melakukan perilaku korupsi. Sehingga pengawasan menjadi hal yang sangat penting dan utama dalam sistem manajemen sumber daya manusia.

Pengawasan merupakan salah satu dari fungsi manajemen yang merupakan landasan fungsional setiap pejabat negara untuk menempati posisi pimpinan dari tingkat tertinggi sampai tingkat yang terendah. Berdasarkan landasan fungsional yang seperti itu berarti bahwa kewenangan pengawasan berada pada pejabat pimpinan, baik pejabat pimpinan struktural sebagai atasan terhadap bawahan, maupun pejabat pimpinan sesuai dengan bidang tugas (substansi) yang dipimpinnya. Pengawasan pada hakekatnya melekat pada jabatan pemimpin sebagai pelaksana fungsi manajemen, disamping keharusan melaksanakan fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan. Dalam melaksanakan fungsi-fungsinya tersebut harus ada kerja sama antara pimpinan dan bawahan.

Hal ini sesuai dengan pendapat T. Hani Handoko (2003): “Semua fungsi manajemen tidak akan efektif tanpa adanya fungsi pengawasan (*controlling*)”. Pengawasan atau *Controlling* adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengawasan dapat bersifat positif maupun negatif. Pengawasan positif mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien dan efektif. Pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang merugikan tidak terulang kembali. Pengawasan yang berjalan dengan baik akan mengurangi dan mencegah kesalahan dari pegawai. Pengawasan akan lebih efektif apabila dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung yang disebut pengawasan melekat.

Menurut Nawawi, Hadari (1995) Pengawasan melekat merupakan proses pemantauan, memeriksa, dan mengevaluasi yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna oleh pimpinan unit organisasi kecil organisasi kerja terhadap sumber-sumber kerja untuk diperbaiki atau disarankan oleh pimpinan yang berwenang pada jenjang yang lebih tinggi demi tercapainya tujuan yang telah dirumuskan

Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka peningkatan Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Berkaitan dengan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesehatan mental dan pengawasan melekat terhadap perilaku korupsi.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mencoba menganalisis pengaruh kesehatan mental dan pengawasan melekat terha-

dap perilaku korupsi. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Fakultas Pertanian Universitas Riau sebesar 153 orang, sedangkan sampel penelitian diambil dengan metode *stratified sampling* sebesar 60 orang. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan digunakan teknik pengumpulan data dengan cara kuisioner, wawancara dan observasi. Metode analisis data menggunakan analisa statistik regresi berganda dengan bantuan program *Statistical Product and Service Solution (SPSS) 16,5 for windows..*

HASIL

Untuk menganalisis pola hubungan antara variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung, secara serempak maupun mandiri dari variabel kesehatan mental (X1) dan pengawasan melekat (X2) terhadap Perilaku korupsi (Y) dengan menggunakan regresi berganda. Untuk membuktikan seberapa besar pengaruh digunakan model persamaan $\hat{Y}=a+b_1X_1+b_2X_2$ dengan menggunakan *Pearson Correlation* terhadap sebaran data variabel yang tersusun dalam matriks korelasi seperti tabel 1.

Tabel 1. Tabulasi Silang Variabel Correlations

Variable	Perilaku Korupsi	Kesehatan Mental	Pengawasan Melekat
Perilaku Korupsi	1.000	-.791	-.580
Kesehatan Mental	-.791	1.000	.513
Peng. Melekat	-.580	.513	1.000

Sumber: SPSS Olahan 2016

Pengaruh Kesehatan Mental terhadap Perilaku Korupsi.

Pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara kesehatan mental terhadap perilaku korupsi pegawai Faperta, Universitas Riau. Hal ini ditunjukkan dengan uji pen-

garuh variable kesehatan mental terhadap variable perilaku korupsi yang menunjukkan t hitung sebesar 7.532 lebih besar dari t table sebesar 1.671 pada tingkat kepercayaan $\alpha = 0.05$ maupun t table sebesar 2.390 pada tingkat kepercayaan $\alpha = 0.01$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis alternative (H1) diterima yaitu terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara variable bebas kesehatan mental (X1) terhadap variable terikat perilaku korupsi (Y).

Berdasarkan hasil uji hipotesis pengaruh antara kesehatan mental dengan korupsi diperoleh nilai koefisien korelasi 0,791, dengan demikian dapat diinterpretasikan terhadap $r_{xy} = 0,791$ terletak antara 0,60-0,799 yang berarti korelasinya kuat.

Pengaruh Pengawasan Melekat terhadap Perilaku Korupsi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang negative dan signifikan antara pengawasan melekat terhadap perilaku korupsi pegawai Faperta, Universitas Riau. Hal ini ditunjukkan dengan uji pengaruh variable bebas pengawasan melekat terhadap variable perilaku korupsi yang menunjukkan t hitung sebesar 2.652 lebih besar dari t table sebesar 1.671 pada tingkat kepercayaan $\alpha = 0.05$ maupun t table sebesar 2.390 pada tingkat kepercayaan $\alpha = 0.01$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis alternative (H1) diterima yaitu terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara variable bebas pengawasn melekat (X2) terhadap variable terikat perilaku korupsi (Y).

Berdasarkan hasil uji hipotesis pengaruh antara pengawasan melekat terhadap perilaku korupsi diperoleh nilai koefisien korelasi 0,580, dengan demikian dapat diinterpretasikan terhadap $r_{xy} = 0,580$ terletak antara 0,40-0,599 yang berarti korelasinya sedang.

Pengaruh Kesehatan Mental dan Pengawasan Melekat terhadap Perilaku Korupsi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan regresi berganda pada F hitung

= 57.208 sedangkan F tabel dengan pembilang 2 dan dk 57 pada taraf signifikan 0.05 sebesar 3.15 dan taraf signifikan 0.01 sebesar 4.98. Oleh karena F hitung > F tabel maka dapat diartikan bahwa regresi variabel kesehatan mental (X1) dan pengawasan melekat (X2) terhadap variabel perilaku korupsi (Y) dengan persamaan $\hat{Y} = 126.513 + (-0.486X1) + (-0.179X2)$. Artinya terdapat pengaruh kesehatan mental dan pengawasan melekat secara simultan terhadap perilaku korupsi pegawai Faperta, Universitas Riau.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.817 ^a	.667	.656	6.990

a. Predictors: Pengawasan Melekat, Kesehatan Mental

b. Dependent Variable: Perilaku Korupsi

Hasil regresi berganda antara kesehatan mental (X1) dan pengawasan melekat (X2) terhadap perilaku korupsi (Y) secara simultan menghasilkan koefisien determinasi (R²) sebesar 0.667. Artinya besarnya pengaruh kesehatan mental (X1) dan pengawasan melekat (X2) secara simultan terhadap perilaku korupsi (Y) adalah sebesar 66.7% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Hasil statistik tersebut menunjukkan bahwa kesehatan mental dan pengawasan melekat secara simultan memberi kontribusi yang sangat signifikan terhadap perilaku korupsi. Artinya semakin sehat mental pegawai dan semakin baik sistem pengawasan melekat maka semakin rendah tingkat perilaku korupsi. Sebaliknya semakin tidak sehat mental pegawai dan semakin buruk sistem pengawasan melekat pegawai maka semakin tinggi tingkat perilaku korupsi.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji hipotesis pengaruh antara kesehatan mental dengan korupsi diperoleh nilai koefisien korelasi 0,791, dengan demikian dapat diinterpretasi-

kan terhadap $r_{xy} = 0,791$ terletak antara 0,60-0,799 yang berarti korelasinya kuat. Hasil statistik tersebut menunjukkan bahwa kesehatan mental memberi kontribusi yang sangat signifikan terhadap perilaku korupsi. Artinya semakin sehat mental seseorang pegawai maka semakin rendah perilaku korupsi. Sebaliknya semakin tidak sehat mental pegawai maka semakin tinggi perilaku korupsi.

Berdasarkan kategorisasi tersebut diperoleh hasil yang berbanding terbalik antara skala kesehatan mental dengan perilaku korupsi pada pegawai. Dengan kata lain kedua variabel mempunyai korelasi negatif yang signifikan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa teori terbukti, yaitu adanya pengaruh antara kesehatan mental dengan perilaku korupsi pada pegawai. Hal ini sesuai dengan pendapat Coleman dalam CSRC, (2006), yang mengatakan terdapat kaitan antara kesehatan mental dengan perilaku korupsi yang dilakukan oleh individu dalam kehidupannya.

Pegawai yang melakukan perilaku korupsi biasanya berkaitan dengan kondisi mental yang dimiliki. Hal ini, dapat dijelaskan pada pegawai yang tidak mampu menunjukkan penyesuaian sikap terhadap diri sendiri lebih rentan terhadap perilaku korupsi dikarenakan keinginan untuk menutupi segala bentuk kekurangan yang ada pada diri sendiri secara cepat tanpa mau berusaha dengan cara yang lebih baik. Sebaliknya, pegawai yang menunjukkan sikap penerimaan diri yang baik, memiliki jati diri yang memadai, dan realitas terhadap kekurangan serta kelebihan diri sendiri akan lebih mampu untuk menghindar serta menekan perilaku korupsi. Hal ini terlihat dari adanya pegawai yang senantiasa bersyukur atas segala sesuatu yang dimiliki dan menjadi bagian dalam hidupnya.

Berdasarkan hasil uji hipotesis pengaruh antara pengawasan melekat terhadap perilaku korupsi diperoleh nilai koefisien korelasi 0,580, dengan demikian dapat diinterpretasikan terhadap $r_{xy} = 0,580$ terletak antara 0,40-0,599 yang berarti korelasinya

sedang, artinya semakin baik tingkat pengawasan melekat seseorang pegawai maka semakin rendah tindakan untuk melakukan perilaku korupsi. Sebaliknya semakin buruk tingkat pengawasan melekat pegawai maka semakin tinggi tindakan untuk melakukan perilaku korupsi.

Hasil statistik tersebut menunjukkan bahwa pengawasan melekat memberi kontribusi yang signifikan terhadap perilaku korupsi. Artinya semakin baik sistem pengawasan melekat pegawai maka semakin rendah perilaku korupsi. Sebaliknya semakin buruk sistem pengawasan melekat pegawai maka semakin tinggi perilaku korupsi.

Pengawasan pada hakikatnya melekat pada jabatan pemimpin sebagai pelaksana fungsi administrasi/manajemen. Namun, pengawasan yang dilakukan tersebut harus ada kerja sama antara pimpinan dan bawahan agar tercipta pemerintahan yang lebih baik. Pengawasan diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.

Untuk mengetahui apakah semua kegiatan sudah berlangsung sesuai peraturan yang berlaku dan kebijaksanaan yang telah digariskan sebelumnya maka diperlukan pengawasan dari atasan langsung atau pimpinan langsung dari suatu instansi yang disebut pengawasan melekat, karena atasan langsung lebih mengetahui situasi di lingkup kerja daripada orang luar.

Pengawasan melekat merupakan salah satu bentuk pengendalian aparatur pemerintah di setiap instansi dan satuan organisasi dalam meningkatkan mutu kinerja di dalam lingkungan tugasnya masing-masing agar tujuan instansi/ organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Hal ini sesuai dengan pendapat Harahap (2006) faktor eksternal penyebab korupsi yang menyengsarakan rakyat adalah akibat lemahnya pengawasan. Pendapat tersebut diperkuat oleh T. Hani Handoko (2003) yang menyatakan bahwa: "Semua fungsi manajemen tidak akan efektif tanpa adanya fungsi pengawasan (*controlling*)".

Setiap atasan langsung dalam melaksanakan pengawasan melekat harus mengetahui secara tepat komponen-komponen yang menjadi sasarannya. Dewasa ini masih tampak gejala bahwa pada umumnya atasan langsung kurang memperhatikan komponen tersebut. Komponen tersebut yaitu pengorganisasian; personil; kebijakan; perencanaan; prosedur; pencatatan, pelaporan, supervisi dan review intern.

Menurut Dadang Solihin, (2000) Pengawasan melekat merupakan salah satu unsur penting dalam rangka peningkatan Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan tugas-tugas umum menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta tercapainya pemerintahan yang baik (Good Governance) dengan lebih memaksimalkan komponen pengawasan melekat.

Hasil regresi berganda antara kesehatan mental (X1) dan pengawasan melekat (X2) terhadap perilaku korupsi (Y) secara simultan menghasilkan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.667. Artinya besarnya pengaruh kesehatan mental (X1) dan pengawasan melekat (X2) secara simultan terhadap perilaku korupsi (Y) adalah sebesar 66.7% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Hasil statistik tersebut menunjukkan bahwa kesehatan mental dan pengawasan melekat secara simultan memberi kontribusi yang sangat signifikan terhadap perilaku korupsi. Artinya semakin sehat mental pegawai dan semakin baik sistem pengawasan melekat maka semakin rendah tingkat perilaku korupsi. Sebaliknya semakin tidak sehat mental pegawai dan semakin buruk sistem pengawasan melekat pegawai maka semakin tinggi tingkat perilaku korupsi.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan pendapat Harahap (2006), penyebab munculnya perilaku korupsi karena 2 faktor yakni: melekat (dorongan kebutuhan dan dorongan keserakahan) dan eksternal (lingkungan dan peluang). Dorongan keserakahan terkait dengan mentalitas/ moral individu sedangkan peluang lebih terkait dengan

lemahnya pengawasan yang didalamnya adalah system pengawasan melekat yang dilakukan oleh pimpinan unit yang langsung membawahi pegawai.

Menurut hasil observasi, oknum pegawai yang cenderung melakukan korupsi dalam dirinya memang sudah terbawa karakteristik atau naluri agresi, rakus atau tamak, dan material. Sehingga berdasarkan hal tersebut, ketika mereka menjadi pegawai yang kesehariannya tidak lepas dengan yang namanya uang, maka disaat ada kesempatan mereka akan rela untuk melakukan apapun termasuk korupsi demi memenuhi semua keinginannya tanpa memikirkan apa akibat yang akan diterimanya dan juga akibat pada yang lain.

Selain itu, oknum pegawai yang melakukan korupsi sebelumnya sudah terbiasa dengan gaya hidup yang bermewah-mewahan. Mulai dari rumah mewah, mobil mewah, pakaian yang bagus-bagus, dan lain-lainnya. Sehingga untuk memenuhi dan mempertahankan gaya hidupnya, cara yang paling cepat dan mudah adalah mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Dan itupun tidak cukup jika hanya mengandalkan gajinya. Maka dari itu, satu-satunya jalan yang harus dilakukan hanyalah korupsi.

Penelitian yang dilakukan Al-Kostar (2007), menyatakan bahwa korupsi berkorelasi dengan faktor politik, sosial, ekonomi, hukum, HAM, dan budaya dalam negara modern. Faktor lain yang berkorelasi dengan korupsi politik adalah budaya konsumtif masyarakat dalam suatu negara, terutama budaya para pemegang kekuasaan atau pihak yang memiliki posisi. Sistem hukum dan penegakan hukum yang feodalistik berkorelasi dengan timbulnya korupsi.

Hal ini diperkuat oleh pendapat Sanusi Arsyad, (2007), menyatakan bahwa faktor penyebab korupsi yang paling signifikan adalah faktor politik dan kekuasaan, ekonomi, nepotisme, dan pengawasan (lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan uji hipotesis yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara kesehatan mental dan pengawasan melekat dengan perilaku korupsi baik secara sendiri-sendiri maupun secara simultan.

Artinya, semakin sehat mental dan semakin baik tingkat pengawasan melekat yang dimiliki pegawai maka tindakan untuk melakukan korupsi semakin rendah. Sebaliknya, jika semakin tidak sehat mental dan semakin buruk tingkat pengawasan melekat pegawai maka tindakan untuk melakukan korupsi semakin tinggi. Faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan korupsi yang paling signifikan adalah faktor politik, kekuasaan, ekonomi, nepotisme dan lemahnya fungsi pengawasan.

DAFTAR RUJUKAN

- Alkostar, Artidjo. 2007. *Korelasi Perilaku korupsi Politik dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern*. Disertasi (tidak di terbitkan). Semarang: Undip
- Arsyad, Sanusi. 2007. *Permasalahan Perilaku korupsi di Daerah dan Strategi Penanggulangannya*. Artikel. *Sulsel: Pengadilan Tinggi*.
- Center for the Study of Religion and Culture (CSRC). 2006. *Pendidikan Anti Perilaku korupsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Darajat, Zakiyah. 1982. *Kesehatan Mental*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Handoko, Hani. 2001. *Manajemen Personalita dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE
- Harahap, Krisna. 2006. *Pemberantasan Perilaku korupsi Jalan Tiada Ujung*. Bandung: PT. Grafitri.
- Hariana, Herlina. 2005. *Hubungan antara Kesehatan Mental dan Motivasi Belajar pada Siswa MAN Kuok, Bangkinang Barat*. Skripsi: tidak diterbitkan. Riau: Fakultas Psikologi UIN Suska Riau.
- Hartanti, Evi. 2006. *Tindak Pidana Perilaku korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartono, Kartini. 2000. *Hygiene Mental*. Bandung: Mandar Maju.
- Nawawi, Hadari. 1995. *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta : Erlangga
- Solihin, Dadang. 2000. *Anti Corruption and Good Governance*. Disampaikan pada Diskusi Mingguan. Sekretariat Pengembangan *Public Good Governance*. Jakarta: Bappenas